

SIKAP POLITIK SOEHARTO TERHADAP ISLAM 1986-1998 M



**Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Adab
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Humaniora**

**Oleh:
Siti Maesaroh
04121867**

**SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM
FAKULTAS ADAB
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Maesaroh
Nim : 04121867
Jurusan : Sejarah dan Peradaban Islam
Fakultas : Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini **tidak terdapat karya serupa yang diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain** dan skripsi saya ini adalah asli karya sendiri dan bukan meniru dari hasil skripsi orang lain.

Yogyakarta, 22 Juli 2008
Yang menyatakan



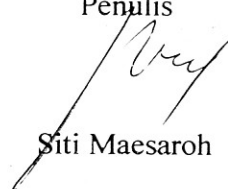

Siti Maesaroh
NIM. 04121867

Semoga cinta dan segala kebaikan kalian semua tulus selalu mendapat balasan cinta dan kasih dari Allah SWT.

Akhirnya dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati penulis mengharapkan dengan sangat, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna perbaikan penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat. Amin.

Yogyakarta, 19 Rajab 1429 H
22 Juli 2008 M

Penulis



Siti Maesaroh



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ADAB

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 513949

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : 3 eksemplar

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Adab

DiYogyakarta

Assalamu 'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengkoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Nur Aeni

NIM : 03121459

Judul Skripsi : Sosialisme Islam Dalam Pandangan Muammar Qadhafi
Dan Pengaruhnya Terhadap Revolusi Libya 1969

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Adab Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Humaniora.

Dengan ini kami mengaharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 21 Juli 2008

Pembimbing,

Drs. Musa, M.Si.

NIP. 150 254 036



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ADAB
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp./Fax. (0274) 513949

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.2/DA/PP.01.1/1209/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Sikap Politik Soeharto Terhadap Islam 1986-1998 M.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Siti Maesaroh

NIM : 04121867

Telah dimunaqasyahkan pada : 6 Juli 2008

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Dr. M. Abdul Karim, M.A., M.A.
NIP.150290391

Penguji I

Drs. Badrun, M.Si.
NIP. 150253322

Penguji II

Drs. Musa, M.Si.
NIP.150254036



Yogyakarta, 8 Agustus 2008

Dekan Fakultas Adab

Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc, M.Ag
NIP. 150218625

MOTTO

خَلِيفَةً الْأَرْضِ فِي جَاعِلٌ إِيَّيَ لِلْمَلَائِكَةِ رَبُّكَ قَالَ وَإِذْ

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat:
“sesungguhnya Aku akan menjadikan seorang khalifah
di muka bumi”. (Q.S Al-Baqarah: ٣٠).^١

^١Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an (Jakarta:, ١٩٧١), hlm. ١٣.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua penulis tercinta,

Almamater penulis Fakultas Adab

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لُحْمَلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Al-hamdulillah segala puji hanya bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Tidak lupa pula semoga shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada Rasul Muhammad SAW, keluarga, sahabat, beserta umatnya yang selalu mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Al-hamdulillah penulis skripsi yang berjudul "SIKAP POLITIK SOEHARTO TERHADAP UMAT ISLAM ١٩٨٦-١٩٩٨ M" dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam rangka menyelesaikan tugas penulisan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

١. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
٢. Bapak Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc., M. Ag., Dekan Fakultas Adab UIN Sunan Kalijag Yogyakarta.
٣. Bapak Dr. Maharsi, M. Hum., Ketua Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam dan Bapak Imam Muhsin, S. Ag., M. Ag., Sekretaris Jurusan Sejarah Kebudayaan dan Peradaban Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- ξ. Bapak Dr. M. Abdul Karim, M. A., M. A., selaku Pembimbing, yang telah memberi saran, arahan dan petunjuk yang berharga selama penulisan skripsi sehingga dapat selesai dengan baik.
- ο. Bapak Ali Sadiqin, S. Ag., M. Ag., Penasehat Akademik atas saran-saran yang diberikannya.
- ϒ. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Adab, khususnya Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Υ. Karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Adab khususnya bagian Tata Usaha Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Bapak Sofwan dan Ibu Haryati atas pelayanannya.
- Λ. Bapak H. Mikun dan Ibu Hj. Tusinah tercinta yang dengan tulus dan ikhlas telah memberikan kasih sayang dan cinta kasihnya, ibu... terimakasih atas do'amu. Kaka penulis Siti Maemunah atas nasehat-nasehat yang diberikan dan keponakan Galih yang telah menghiburku dengan keceriaannya.
- ϣ. Mas tercinta Arif Warsono yang dengan tulus memberikan semangat dan motivasi dalam menjalani dunia pendidikan, khususnya pada saat menyelesaikan skripsi.
- ϝ. Teman-teman angkatan ϝ • • ξ Jurusan Sejarah Kebudayaan dan Peradaban Islam dan semua teman-teman yang tidak tersebut di sisni. Karena dengan adanya mereka sangat membantu sekali terhadap penulis dalam rangka penulisan skripsi.

Semoga cinta dan segala kebaikan kalian semua tulus selalu mendapat balasan cinta dan kasih dari Allah SWT.

Akhirnya dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati penulis mengharapkan dengan sangat, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna perbaikan penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat. Amin.

Yogyakarta, 19 Rajab 1441 H
22 Juli 2020 M

Penulis

Siti Maesaroh

ABSTRAKSI

SIKAP POLITIK SOEHARTO TERHADAP ISLAM

1986-1998 M.

Soeharto yang akrab dengan panggilan Pak Harto menjabat sebagai presiden selama 32 tahun, yakni dari tahun 1966 sampai dengan tahun 1998. Selama itulah Negara Indonesia dikuasai oleh Rezim Otoriter di bawah pimpinan Soeharto dan kroni-kroninya. Dalam catatan sejarah, selama 32 tahun memerintah, Soeharto telah memandang umat Islam sebagai lawan dan bersikap represif terhadap umat Islam, akan tetapi 10 tahun diakhir masa jabatannya Soeharto mengalami pergeseran sikap menjadi akomodatif terhadap umat Islam. Dari pergeseran sikapnya inilah, penulis tertarik untuk lebih dalam membahas dan menguak latar belakang dari pergeseran sikap politik Soeharto terhadap umat Islam.

Penelitian ini adalah penelitian historis (*historical research*) yang bertujuan merekonstruksi masa lampau secara objektif dan sistematis. Jika dilihat dari segi menganalisisnya penelitian ini bersifat kualitatif. Dilihat dari segi bahan-bahan atau obyek yang diteliti, penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian menggunakan bahan-bahan tertulis seperti buku, majalah, surat kabar, artikel, seputar Soeharto dan kebijakan-kebijakannya terhadap umat Islam, serta perpolitikan pada masa Orde Baru.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Kebijakan Publik (*public police*) guna mendapatkan analisis yang lebih dalam terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Soeharto terhadap umat Islam. Beranjak dari pendekatan kebijakan publik ini, maka teori yang digunakan adalah teori *pluralis-elitist*, yakni kebijakan yang berfokus pada kekuasaan dan distribusinya diantara kelompok elit, yakni Soeharto dan orang-orang di sekelilingnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: seperti apakah sosok Soeharto?, dan bagaimanakah sikap politik Soeharto terhadap Islam tahun 1986-1998 M?.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal ١٠ September No. ١٥٨ tahun ١٩٨٧ dan No. ٠٥٤٣ b/u/١٩٨٧. Secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

Konsonan Tunggal

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasi dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā‘	b	be
ت	tā‘	t	te
ث	śā	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	hā‘	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā‘	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā‘	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	d	de (dengan titik di bawah)
ط	āt	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā‘	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain		koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā‘	f	ef
ق	qāf	q	ki
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mim	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāwu	w	we

هـ s	hā'	h	ha
ء	hamzah	...'	apostrof
ي	yā'	y	ye

Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	ḍammah	u	u

Contoh:

كتب - Kataba	يذهب - Yazhabu
فعل - Fa'ala	سئل - Su'ila
ذكر - zukira	

Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Haula - هول

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ اِ اُ اِىْ اِوْ اِوْ	ah dan aliḥFath atau ya	ā	a dan garis di atas
اِىْ اِوْ	Kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
اِوْ اِوْ	ammah dan waḥd	ū	u dan garis di atas

يقول - Yaqūlu

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Contoh: طلحة aḥaḥ- T

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh:

روضة الاطفال ah al-atfāl- Raud

المدينة المنورة - al-Madinah al-Munawwarah

Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

المنورة - al-Munawwarah

Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis al.

الشمس – asy-syamsu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGASAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAKSI	x
PEDOMAN TRANSLITASI	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Landasan Teori.	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II SEKILAS TENTANG SOEHARTO	19
A. Perjalanan Karir Militer Soeharto	19
B. Model Pemerintahan Soeharto	25
C. Umat Islam pada Masa Orde Baru	30

BAB III	KEBIJAKAN AKOMODATIF SOEHARTO TERHADAP	
	ISLAM TAHUN 1986-1998	37
	A. Kebijakan di Bidang Pendidikan	38
	B. Kebijakan di Bidang Hukum	44
	C. Kebijakan di Bidang Ekonomi	48
	D. Kebijakan di Bidang Keagamaan	49
	E. Kebijakan di Bidang Sarana dan Prasarana Ibadah	52
BAB IV	PERGESERAN SIKAP POLITIK SOEHARTO TERHADAP	
	ISLAM	55
	A. Kooptasi Soeharto terhadap Islam	56
	B. Akomodasi Soeharto terhadap Islam	61
	C. Integrasi Umat Islam ke Soeharto	64
BAB V	PENUTUP	68
	A. Kesimpulan	68
	B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Filename: DAFTAR ISI
Directory: E:\Chanif Nitip\skripsiku\Intaha
Template: C:\Documents and Settings\M Hanif\Application
Data\Microsoft\Templates\Normal.dot
Title:
Subject:
Author: Mei
Keywords:
Comments:
Creation Date: م 04:00:00 2008/07/30
Change Number: 3
Last Saved On: ص 09:15:00 2008/08/10
Last Saved By: Hanif
Total Editing Time: 3 Minutes
Last Printed On: ص 09:34:00 2008/08/10
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 2
Number of Words: 185 (approx.)
Number of Characters: 1,188 (approx.)

BAB I

PENDAHULUAN

"Tak ada kawan sejati dan lawan abadi,
yang ada adalah kepentingan abadi"
Ungkapan klasik yang sudah sangat familiar, tepat untuk
menggambarkan sikap politik rezim Soeharto terhadap umat Islam.

---Rifai Hutapea¹

A. Latar Belakang

Surat perintah 11 Maret 1966, atau dikenal dengan istilah Supersemar, merupakan titik awal kelahiran Orde Baru (Orba), Supersemar ini mengantarkan Jenderal Soeharto sebagai pemegang mandat kepemimpinan nasional, Presiden Republik Indonesia.²

Pada masa awal Orde Baru, Soeharto mendekati Islam untuk mendapatkan dukungan Islam. Soeharto dan Islam bersama-sama dalam menumpas Partai Komunis Indonesia (PKI), di setiap daerah yang ada di Indonesia. Namun pada tahun-tahun 1966-1981 setelah rezim ini (Orba) berdiri dengan kokohnya, perlahan Soeharto meninggalkan Islam dan berbalik memusuhi Islam. Hal ini dikarenakan Orba atau sering disebut juga dengan "Era Pembangunan" berorientasi pada pembangunan yang terlalu mengutamakan pertumbuhan ekonomi, yang memerlukan stabilitas politik.

¹ Rifai Hutapea, "Ketika Soeharto Ijo Royo-royo", dalam *Majalah Islam Sabili*, Juli 2004 edisi khusus Islam Lawan atau Kawan, hlm. 50.

² Abdul Aziz, *Politik Islam Politik, Pergulatan Ideologi PPP Menjadi Partai Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), Hlm. 61.

Soeharto menganggap berbagai ideologi dan agama, khususnya agama Islam yang bersifat politik sebagai ancaman mutlak ketidakstabilan politik, yang akan mengancam rezim Orbanya. Tidak heran jika Soeharto melakukan sistem kontrol yang ketat terhadap Islam.

Pandangan ekstrem Soeharto terhadap politik Islam dapat dilihat dari beberapa kebijakan politik Soeharto yang dirasa sangat merugikan Islam, seperti: gagalnya pembentukan Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII), gagalnya rehabilitasi Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan berdirinya Partai Muslim Indonesia (Parmusi), dimasukkannya aliran kepercayaan dalam Sidang Umum (SU) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 1973, rancangan Undang-undang Perkawinan dan masalah perjudian, penghapusan hari libur sekolah di bulan puasa (Ramadhan), larangan pelajar sekolah menengah memakai jilbab, dan membatasi aktivitas masjid kampus yang baru saja berkembang.³

Pada tahun-tahun 1982-1985 sikap Soeharto terhadap Islam masih bersifat represif yang sangat menyakitkan hati umat Islam. Seperti halnya peristiwa berdarah (Peristiwa Tanjung Priok, Peristiwa Lampung, dan Barisan Jubah Putih di Aceh), yang telah merenggut banyak nyawa muslim.

Titik awal perubahan sikap politik Soeharto dianggap akomodatif terhadap kepentingan Islam terjadi saat Soeharto selaku Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menghentikan Jendral Leonardus Benyamin Moerdani dari jabatannya selaku Panglima

³ M. Rusli Karim, *Dinamika Islam di Indonesia, Suatu Tinjauan Sosial dan Politik* (Yogyakarta: Hanindita, 1985), hlm. 49-50.

ABRI, dan menunjuk Jendral Try Sutrisno seorang muslim taat sebagai penggantinya, yang oleh sebagian pendapat mengatakan bahwa terjadi penghijauan dalam tubuh ABRI. Lengsernya mantan Pangab LB. Moerdani ternyata membawa angin segar bagi masyarakat, terutama bagi kaum muslim⁴. Setelah itu, sejumlah kebijakan pemerintah dianggap lebih 'berpihak' ke kalangan umat Islam. Sikap 'persahabatan' pemerintah terhadap umat Islam terlihat pada saat pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989. Dalam RUU tersebut, pemerintah mengakomodasi kepentingan umat Islam dengan mencantumkan ketentuan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib yang harus diberikan kepada anak didik dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT), baik negeri maupun swasta.⁵

Selain itu, disetujui pula untuk dimasukkan kedalam penjelasan bahwa apabila di sekolah-sekolah swasta terdapat sekurang-kurangnya 10% anak didik yang memeluk agama lain dari agama yang dianut oleh penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan, penyelenggara diwajibkan menyediakan guru agama yang dipeluk anak didik penganut agama lain tersebut. Guru agama yang memberikan pendidikan agama kepada anak didik wajib beragama sesuai dengan agama anak didik tersebut.

Kebijakan pemerintah ini spontan saja membetot perhatian kelompok non-Muslim, terutama kaum Nasrani. Mereka menolak keras kebijakan pemerintah ini dan menyatakan bahwa sekolah-sekolah umum yang

⁴ Kaum Muslimin adalah sebutan bagi umat Islam, muslim sendiri berarti orang Islam (Islam taat), penganut Islam.

⁵ Hutapea, *ketika*, hlm. 51.

diselenggarakan pihak swasta berhak sepenuhnya hanya memberikan pendidikan agama menurut agama yang dianut oleh penyelenggara Sekolah. Namun, pemerintah tetap bersikukuh dengan RUU tersebut. 'Keperpihakan' rezim Orba terhadap umat kembali berlanjut saat munculnya RUU Peradilan Agama (PA) pemerintah mengakomodasi kepentingan umat Islam dengan mengajukan RUU yang prinsipnya antara lain, bagi mereka yang beragama Islam berlaku hukum Islam, seperti dalam masalah perkawinan, waris, wakaf, hibah dan sedekah.⁶

RUU ini kembali mendapat reaksi keras dari kelompok-kelompok Islamofobia.⁷ Mereka menolak RUU PA dengan menuduh bahwa ketentuan yang termuat di RUU PA itu adalah implementasi dari Piagam Jakarta yang sejak lama ingin digolkan umat Islam ke perundangan Negara. Menghadapi hal ini, Soeharto bersikap tegas dan menyatakan bahwa pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan RUU PA.

Pemerintah Orba juga memiliki andil besar mengakomodasikan ekonomi keumatan. Bersama-sama sejumlah menteri, Soeharto merestui beroperasinya bank Islam, yakni Bank Muamalat Indonesia (BMI). Kemudian mendapatkan legitimasi kuat setelah RUU Perbankan disahkan menjadi Undang-Undang (UU) Perbankan. UU Perbankan ini pula yang menjadi landasan hukum berdirinya lembaga-lembaga keuangan Syari'ah, seperti Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPR Syaria'ah) diseluruh pelosok indonesia.

⁶ *ibid.*

⁷ Umat Islam yang takut untuk menyuarakan kepentingan Islam, atau golongan non-Islam yang takut pda kekuatan Islam dan cenderung untuk memusuhi Islam.

Keperpihkan rezim Orba terhadap kepentingan kaum muslimin tidak hanya tampak di undang-undang saja. berbagai langkah dan dan kebijakan Soeharto tampak pula mendukung umat Islam. Ribuan, bahkan puluhan ribu masjid berdiri diseluruh nusantara atas bantuan Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila pimpinan Soeharto. Ribuan da'i pun dikirim ke pelosok-pelosok Nusantara dengan dana dari presiden.

'Kemesraan' Soeharto dengan umat Islam terus berlanjut dengan merestui berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Soeharto tidak menolak saat Habibie yang notabene seorang muslim taat, diminta para cendekiawan muslim sebagai ketua umum ICMI.

Dari sinilah penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terhadap pergeseran sikap politik Soeharto, dari sikapnya yang antagonis semenjak berdirinya rezim Orba yang didirikannya, hingga tiba-tiba di tahun 1990-an sikapnya berubah menjadi akomodatif terhadap umat Islam. Sikap akomodasionisnya yang tidak hanya menyentuh masalah politik Islam saja, tetapi juga menyentuh masalah-masalah lainnya seperti: hukum, ekonomi, dan pendidikan, bahkan masalah ibadah. Pada era 1990-an ini Soeharto terus melancarkan berbagai program dan kebijakannya yang cenderung memihak pada kepentingan umat Islam. Soeharto tidak ragu dan tetap konsisten dalam menjalankannya meskipun mendapat reaksi keras dari kelompok Islamofobia yang terus meneriakan bahwa Soeharto akan mengadakan 'penghjauan' terhadap calon MPR, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan memakai tangan Habibie. Melalui

berbagai media massa yang mereka kuasai, kelompok Islamofobia menyiarkan secara bombastis apa yang mereka istilahkan "DPR/MPR ijo royo-royo" atau "ICMI main politik" dan tuduhan- tuduhan lain.

Mendekatnya Soeharto ke umat Islam pada saat itu adalah realitas politik yang dihadapi umat pada saat itu. Berbagai pertanyaan pun kemudian muncul, hal apakah gerakan yang melatar belakangi pergeseran sikapnya tersebut. Dari sinilah kiranya permasalahan ini penulis angkat untuk diteliti lebih lanjut.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Untuk lebih mempermudah dan memfokuskan penyelidikan atas fakta-fakta sejarah dalam penelitian maka perlu dirumuskan terlebih dahulu beberapa hal yang terkait dengan topik skripsi ini. Pertama, sikap politik Soeharto. Sikap politik Soeharto dapat dilihat dari beberapa kebijakan yang ia ambil terkait dengan masalah Islam, yang lebih difokuskan pada kebijakannya yang bersifat akomodatif.

Kebijakan (*policy*) sendiri berarti menciptakan atau merekayasa sebuah cerita yang masuk akal dalam rangka mengamankan tujuan-tujuan,⁸ dalam hal ini Soeharto sebagai seseorang yang membuat kebijakan tersebut. Kata kebijakan (*policy*) umumnya dipakai untuk menunjukan pilihan terpenting yang diambil baik dalam kehidupan organisasi atau privat.

⁸ Wayne Parsons, *Public Policy; Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, terj. Tri Wibowo Budi Santoso (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 16.

'kebijakan' bebas dari konotasi yang dicakup dalam kata politis (*political*) yang sering kali diyakini mengandung makna keperpihakan.⁹

Adapun Pemilihan penggunaan Soeharto, karena penulis memandang pemerintahan Orde Baru merupakan pemerintahan yang bersifat sentralistik, di mana kekuasaan berada hanya pada satu pusat yakni Presiden Soeharto. Secara struktural, presiden adalah seorang yang duduk dalam hierarki tertinggi pemerintahan, karena kedudukannya sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan, tak pelak lagi menjadi pengisi kursi puncak hierarki politik dan kekuasaan.¹⁰

Kedua Islam. Konsep Islam lebih ditekankan pada kelompok Islam yang berorientasi pada ajaran Islam secara substansi atau nilai yang terkandung di dalamnya (*substantif-integratif-inklusif*), mengacu pada mereka yang memandang Islam sebagai sekumpulan nilai-nilai universal (*rahmatan lil'alam*) yang harus disosialisasikan melalui perilaku (budaya), seperti keadilan, persamaan, dan musyawarah. Kelompok ini memakai pendekatan *bottom up*, yakni berusaha mereformasi ajaran Islam secara tekstual, sesuai dengan zaman dimana umat Islam hidup dan tinggal, masuk dalam dunia politik.¹¹

⁹ *Ibid.*, hlm. 17.

¹⁰ Eep Saefullah Fattah, *Penghianatan Demokrasi Ala Orde Baru* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 44.

¹¹ Menurut Bahtiar untuk menyebut kelompok Islam politik di Indonesia dapat dibagi menjadi dua. Pertama, kelompok Islam yang berorientasi pada tegaknya ajaran Islam secara formal dan legal (formalistik-legalistik-eksklusif), yakni pandangan sebagian umat Islam yang menginginkan Islam sebagai ajaran Islam yang harus ditegakan secara formal dan legal secara institusi dan negara. Dari segi perjuangannya kelompok ini memakai pendekatan *top-down*, yaitu penegakan ajaran Islam secara konstitusional yang disahkan oleh pemerintah dan harus dijalankan oleh masyarakat. Model Islam politik yang seperti ini tidak disukai oleh rezim Orde Baru, sehingga dalam ruang lingkungannya selalu dibatasi. Terpinggirnnya Islam politik dalam pencatatan

Untuk mempermudah penelitian ini, maka permasalahan dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. seperti apakah sosok Soeharto?
2. bagaimanakah sikap politik Soeharto terhadap Islam 1986-1998?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Secara umum sejarah dipergunakan untuk merekonstruksi kejadian masa lampau umat manusia.¹² Demikian juga penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi kembali peristiwa masa lampau, tentang keadaan Islam Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk melihat pergeseran sikap politik Soeharto yang cenderung lebih ke Islam, faktor apakah yang mempengaruhinya.

Adapun hasil penelitian diharapkan dapat berguna:

1. dengan melihat sikap politik Soeharto, kiranya dapat memberikan wacana baru tentang perpolitikan di Indonesia
2. untuk menambah informasi dan bahan perbandingan terutama bagi mereka yang berminat meneliti lebih lanjut tentang kajian politik pada masa Orde Baru yang berkaitan dengan Islam.

nasional, membawa umat Islam pada kesadaran untuk merubah cara berpoliticnya, sehingga munculah kelompok Islam politik yang kedua yakni, kelompok Islam yang berorientasi pada tegaknya ajaran Islam secara substansi atau nilai yang terkandung di dalamnya (substantif-integratif-inklusif), mengacu pada mereka yang memandang Islam sebagai sekumpulan nilai-nilai universal (*rahmatan lil'alam*) yang harus disosialisasikan melalui perilaku (budaya), seperti keadilan, persamaan dan musyawarah. Kelompok ini memakai pendekatan *buttum up*, yakni berusaha mereformasi ajaran Islam secara tekstual, sesuai dengan zaman dimana umat Islam hidup dan tinggal, masuk dalam dunia politik. Lihat Bahtiatiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran Dan Praktek Politik Islamdi Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 271.

¹² Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Bentang, 1995), hlm. 17.

D. Tinjauan Pustaka

Pembahasan tentang Soeharto memang sudah sangat banyak, baik itu yang berupa buku ataupun artikel, baik dari segi politik, sosial, ekonomi, budaya dan lainnya. Dari sinilah penulis tergerak untuk ikut melengkapi penulisan tentang Soeharto, dengan melihat pergeseran sikap politik Soeharto terhadap Islam yang lebih ditekankan pada kebijakan-kebijakan Soeharto cenderung akomodatif terhadap Islam. Adapun buku-buku yang penulis gunakan sebagai bahan acuan dalam penulisan sikap politik Soeharto terhadap Islam, seperti:

Jejak Langkah Pak Harto, ditulis oleh G. Dwipayana dan Nazaruddin yang diterbitkan oleh penerbit Citra Lamtoro Gung di Jakarta. Buku ini berbentuk seperti buku harian atau Agenda yang menulis secara jelas tanggal, bulan, dan tahunnya, hampir disetiap keseharian Soeharto. Akan tetapi yang ditulis di sini hanya berkaitan dengan acara-acara penting saja, seperti pertemuan Soeharto dengan kepala Negara lain, kunjungan Soeharto ke luar negeri, kunjungan Soeharto ke berbagai daerah di Indonesia, yang mana sebagian besar dari kunjungannya adalah kunjungan dalam rangka perbaaikan/pembangunan ekonomi bangsa Indonesia. Buku tersebut juga menulis tentang kunjungan Soeharto di daerah-daerah yang kental dengan Islam, seperti Aceh, misalnya. Adapun hasil dari kunjungannya ke daerah-daerah Islam telah menghasilkan adanya kebijakan mengenai sistem zakat dan perihal haji yang kemudian diatur/ditangani sepenuhnya oleh pemerintah.

Buku karangan O. G. Roeder, *Biografi Soeharto Anak Desa*, terbitan Gunung Agung tahun 1969 dan buku karangan Dwipayana, G dan Ramadhan, *Soeharto, Otobiografi, Pikiran dan Tindakan Saya* terbitan Lamtoro Gung Perkasa tahun 1988. Kedua buku ini meskipun ditulis oleh orang yang berbeda namun dapat dikatakan mempunyai isi yang hampir sama, melihat bahwa buku ini ditulis pada masa yang sama, yakni pada masa Soeharto masih berkuasa. Buku ini berisikan tentang asal-usul Soeharto yang berasal dari desa, yang mempunyai jiwa yang luhur serta adil dan bijaksana dalam mengemban tugas Negara. Yang dapat diambil dari buku ini adalah, penulis mencoba membaca sikap Soeharto dari beberapa perilakunya.

Dari buku-buku di atas, penulis dapat mengambil pemahaman terhadap watak atau sikap Soeharto, yang kemudian akan berpengaruh terhadap perilaku politiknya. Buku di atas jelas berbeda dengan penulisan prososal ini, karena prosal ini lebih menyoroti pada hal sikap politik akomodatif Soeharto terhadap Islam.

Buku R. E. Elson, *Soeharto, Sebuah Biografi Politik*, terbitan Pustaka Minda Utama tahun 2005, berbeda dengan penulisan-penulisan biografi Soeharto di atas, buku ini sudah sedikit memiliki nilai objektif dalam penulisannya tentang diri Soeharto. Soeharto diceritakan sebagai seorang yang mempunyai sedikit wawasan, namun diakui pula bahwa Soeharto adalah seorang yang mujur dan pintar dalam dunia politik.

Soeharto 1998, buku yang ditulis dari catatan seorang wartawan Adian Husaini menceritakan tentang perjalanan hidup dan sosok Soeharto, terutama

seputar dekade 1990-an. Dalam buku ini diceritakan tentang pandangan Orde Baru terhadap Islam, yang mana banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang menguntungkan Islam, seperti pengiriman para Da'i ke daerah-daerah transmigran. Disini diperlihatkan bahwa pemerintah sangat mendukung program Islamselama itu tidak bertentangan dengan Pancasila dan murni berupa keagamaan (tidak berbau pergerakan dan politik).

Menyusul bab-bab selanjutnya berisikan tentang masa-masa sekitar dekade 1990-an yang mana terjadi perubahan dalam diri Soeharto yang cenderung berpihak pada Islam karena kecewa terhadap orang-orang kepercayaannya, yang justru ingin menyainginya. Keperpihakan Soeharto terhadap Islam dibuktikan dengan didirikannya ICMI. Selain itu analisis dari A. M. Fatwa mengenai Soeharto juga turut melengkapi isi buku ini, Fatwa menunjuk salah satu momentum penting dalam perjalanan hidup Soeharto, yaitu ibadah hajinya tahun 1991. Ibadah haji bukan peristiwa biasa. Betapa pun, Soeharto adalah seorang kepala Negara muslim. Selain itu Fatwa juga menyarankan kepada umat Islam yang pernah merasa kecewa terhadap pemerintahan Soeharto, agar berbaik hati mema'afkan dan mendoakan agar Soeharto khusnul khatimah diakhir jabatannya. Bedanya dengan penelitian ini adalah, penelitian ini melihat kebijakan-kebijakan Soeharto terhadap Islam tidak hanya di era 1990-an, akan tetapi melihat kebijakan akomodatif Soeharto terhadap Islam secara utuh pada tahun 1986-1998.

Buku *Negara dan Peminggiran IslamPolitik*, tulisan M. Rusli Karim, terbitan Tiara Wacana. Buku ini berisi implikasi dari kebijakan pembangunan

terhadap Islam politik di Indonesia era 1970-an dan 1980-an. Adapun kebijakn-kebijakan yang dianggap telah meminggirkan umat Islam seperti: birokratisasi, militerisasi, jawanisasi, departisasi dan deideologisasi. Selain itu terdapat pula kristenisasi dampak dari pembangunan ekonomi secara tidak langsung.

Buku karangan Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara, dalam Politik Orde Baru*, terbitan Gema Insani Press tahun 1996. buku ini mengupas tuntas kedudukan Islam dalam Negara Indonesia, bahwasanya Islam pada masa Orde Baru mengalami marginalisasi politik, Islam dianggap sebagai ancaman yang mengakibatkan banyak kebijakan pemerintah yang merugikan Islam.

Dari kedua buku di atas penulis mendapatkan beberapa kebijakan-kebijakan Soeharto dari kebijakan yang merugikan hingga kebijakan yang menguntungkan, namun masih dalam bentuk yang umum dan saling melengkapi. Bedanya dengan proposal yang penulis buat, bahwa proposal ini lebih spesifik pada kebijakan yang akomodatif dan faktor yang mempengaruhinya, pada tahun 1986-1998.

E. Landasan Teori

Selama lebih dari tiga puluh dua tahun berkuasa, menurut catatan sejarah tidak selamanya rezim otoriter di bawah pimpinan Soeharto mengalami konfrontasi dan sikap antagonis. mulai awal-awal tahun 1990-an, terjadi perubahan sikap politik Soeharto yang cenderung akomodatif terhadap Islam.

Untuk dapat memahami bergesernya sikap politik Soeharto dapat diambil dari beberapa kebijakan yang diterapkannya. Untuk itu digunakan Studi politik, yakni berusaha memahami bagaimana keputusan-keputusan yang otoritatif atau sah dibuat dan dilaksanakan dalam suatu masyarakat.¹³ Untuk lebih spesifiknya maka penulis menggunakan pendekatan kebijakan publik (*public policy*) guna mendapatkan analisis yang lebih dalam terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Soeharto terkait dengan Islam.

Mengutip pendapat Miriam, Kebijakan (*policy*) merupakan hasil dari suatu keputusan setelah melalui penilaian-penilaian alternatif yang tersedia yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif. Dengan demikian kebijakan akan menyangkut dua aspek yaitu: proses pelaksanaan keputusan dan dampak dari pada pelaksanaan tersebut. Dengan demikian lingkup studi kebijakan sangat luas mulai dari sebab-sebab ditetapkannya suatu kebijakan, isi kebijakan, proses pelaksanaan kebijakan serta dampak suatu kebijakan.¹⁴ Jadi dengan pendekatan ini penulis mengetahui latar belakang bergesernya sikap politik Soeharto yang berupa kebijakan yang condong ke Islam, serta isi, dan tujuan dibalik pengambilan kebijakan tersebut.

¹³ David Easton, "Analisis Sistem Politik", dalam: Mohtar Mas'oeed dan Colin Mc Andrews (ed.), *Perbandingan Sistem Politik* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), hlm. 4.

¹⁴ Miriam Budiarjo, Tri Nuke Pudjiastuti, *Teori-Teori Politik Dewasa Ini* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 229.

Teori yang penulis gunakan adalah teori *Pluralist-Elitist Aproach*¹⁵ (kebijakan yang berfokus pada kekuasaan dan distribusinya di antara kelompok dan elit). Menurut teori ini masyarakat terbagi dalam dua kelas, kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah. Kelas yang memerintah berjumlah kecil dari pada kelas yang diperintah, dengan menapilkan semua fungsi politik, monopoli kekuasaan, dan sekaligus menikmatinya. yang diperintah jumlahnya cenderung besar akan tetapi tidak mempunyai wewenang dan kekuasaan, keberadaanya hanyalah sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan kelas yang memerintah. Di sini jelas bahwa segala kebijakan sepenuhnya ada pada kelas yang memerintah atau Soeharto dengan segala kekuasaannya yang penuh, yakni sebagai ketua dewan Pembina Golkar, panglima tertinggi ABRI, dan mandataris MPR sebagai puncak eksekutif, sedangkan yang menjalankan atau kelas yang diperintah adalah masyarakat, khususnya Islam.

Untuk lebih dalam ditegaskan bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan pada masa Orde Baru sepenuhnya atas kekuasaan presiden Soeharto, meski dalam prosesnya Soeharto tetap dibantu oleh para pembantu atau kelompok elit birokrat yang dekat, yang masing-masing mempunyai

¹⁵ Kerangka kebijakan publik, terdiri dari berbagai teori untuk menjelaskan konteks politik dari perbuatan kebijakan, kita bisa mengemukakan enam teori yakni: *Stagis Aproaches* (memandang proses kebijakan sebagai proses yang terdiri dari serangkaian tahapan atau urutan-urutan), *Pluralist-Elitist Aproach* (kebijakan yang berfokus pada kekuasaan dan distribusinya diantara kelompok dan elit "segitiga besi", *Neo-Marxist Aproaches* (yang mengkaji aplikasi ide-ide Marx dan marxis untuk menjelaskan perbuatan kebijakan dalam masyarakat kapital, *Sub-Sistem Aproaches* (yang menganalisis pembuatan kebijakan dalam term metafora baru, seperti "network, communities, dan Sub-sistem"), *Policy Discourse Aproaches* (yang mengkaji proses kebijakan dari sudut pandang bahasa dan komunikasi), Institutionalism (sebuah pendekatan baru yang mengkaji tentang proses kebijakan. Lihat Miriam Budiarjo, Tri Nuke Pudjiastuti, *Teori*, hlm 231-233. Baca juga *Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, terj. Tri Wibowo Budi Santoso (Jakarta: Kencana, 2006).

kepentingan baik dari pihak Islam ataupun non Islam, namun pengaruhnya sangatlah sedikit.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian historis (*historical research*) yang bertujuan merekonstruksi masa lampau secara obyektif dan sistematis.¹⁶ Jika dilihat dari segi menganalisisnya penelitian ini bersifat kualitatif. Melihat dari segi bahan-bahan atau obyek yang diteliti, penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian menggunakan bahan-bahan tertulis seperti buku, majalah, surat kabar, dan artikel, seputar Soeharto dan kebijakannya terhadap umat Islam, serta perpolitikan pada masa Orde Baru.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah (*historical methode*). Untuk lebih jelasnya, penulis menjelaskan metode sejarah (*historical methode*) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Heuristik

Heuristik atau pengumpulan data, dalam tahap ini penulis berusaha mencari dan mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan judul skripsi. Dalam proses pengumpulan sumber-sumber yang kaitannya dengan kepustakaan atau tertulis, penulis dapatkan dari buku-buku sejarah dan politik, panduan penulisan skripsi, dan metodologi penelitian, serta buku-buku teori-teori disiplin ilmu kebijakan yang terkait dengan skripsi

¹⁶ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Grafindo Perada, 1998), hlm. 126.

ini. Selain dari buku, penulis juga menggunakan sumber dari media masa yang menyajikan informasi politik pada masa orde baru, seperti: Surat Kabar dan Majalah.

2. Verifikasi

Setelah data terkumpul, maka dilakukan tahap verifikasi atau kritik sumber. Hal ini dilakukan dengan cara mengklasifikasikan dan mencari bagian-bagian yang sangat terkait dengan permasalahan. Langkah berikutnya ialah melakukan kritik, yakni kritik ekstern untuk mendapatkan sumber-sumber yang otentik (keaslian sumber). Kemudian kritik intern, yakni untuk menetapkan kredibilitas atau nilai bukti yang terdapat pada sumber.¹⁷

Dengan cara melihat keterangan waktu, tokoh yang menulis dan model penulisan pada buku yang terkait. Berbeda dengan uraian yang berasal dari media, untuk mendapatkan uraian yang berasal dari media membutuhkan sedikit ketelitian dan kecermatan dalam menganalisisnya. Karena, Meskipun media selalu menyajikan informasi politik yang terbaru, namun informasi ini berbeda dengan data akademik dan terkadang mempunyai tujuan dan maksud tertentu.

3. Interpretasi

Dalam tahap ini dilakukan analisis (menguraikan) dan sintesis (memadukan atau menggabungkan) data yang otentik dan kredibel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yakni sikap politik Soeharto

¹⁷ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2007), hlm. 61.

terhadap Islam 1986-1998, Sehingga tercipta suatu kesatuan yang harmonis, utuh, dan logis.

4. Historiografi

Dalam tahap ini penulis menyajikan karya ilmiah yang sistematis dengan merekonstruksi peristiwa-peristiwa masa lalu melalui data dan sumber yang telah didapat dan telah melewati tahap-tahap metode penulisan sejarah, sehingga tersusun rangkaian fakta sejarah yang kronologis.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh suatu hasil yang utuh dan mempermudah pemahaman terhadap hasil penelitian ini, maka disusunlah sistematika sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, di dalamnya memuat tentang keunikan mengenai bahasan sikap politik Soeharto terhadap Islam 1986-1998. Batasan dan rumusan masalah, dimaksudkan untuk membatasi wilayah apa saja yang akan dikaji, untuk kemudian dirumuskan. Kemudian tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka (membandingkan penulisan-penulisan sebelumnya, untuk kemudian dijadikan sebagai referensi, dan mengisi celah yang ada), landasan teori (menggunakan pendekatan dan teori yang sesuai sebagai pisau analisis untuk membedah permasalahan), setelah itu metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya Bab II, melihat pola hubungan Pemerintahan Soeharto dengan Islam. Dengan melihat sikap dan perilaku Soeharto terhadap umat Islam politik, disertai dengan beberapa kebijakan dan kerusuhan yang terasa menyakitkan Islam. Serta respon umat Islam sendiri terhadap keadaan yang terjadi pada saat itu.

Bab III, berupa pemaparan beberapa kebijakan yang cenderung mewakili kepentingan Islam yang diambil pemerintah Soeharto. Proses-proses pengambilan kebijakan serta isi dari masing-masing kebijakan.

Setelah melihat beberapa kebijakan dan implikasinya terhadap umat Islam, dilanjutkan dengan Bab IV, menjelaskan sebab dan tujuan dari masing-masing kebijakan yang bersifat akomodatif, yang diambil oleh presiden Soeharto.

Terakhir adalah V, yang berisi kesimpulan dan saran dari politik akomodatif Soeharto terhadap Islam.

Filename: BAB I
Directory: E:\Chanif Nitip\skripsiku\Intaha
Template: C:\Documents and Settings\M Hanif\Application
Data\Microsoft\Templates\Normal.dot
Title: BAB I
Subject:
Author: Mei
Keywords:
Comments:
Creation Date: م 04:48:00 2008/07/30
Change Number: 8
Last Saved On: م 10:58:00 2008/08/07
Last Saved By: Mei
Total Editing Time: 37 Minutes
Last Printed On: ص 09:29:00 2008/08/10
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 18
Number of Words: 3,482 (approx.)
Number of Characters: 19,851 (approx.)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Soeharto adalah seorang presiden yang mempunyai kepribadian tenang dan pendiam, namun dibalik sifat pendiamnya, ia memiliki otak yang pintar dan cerdas, maka tidak heran jika orang-orang menyebutnya sebagai pakar politik (politikus ulung) dan ekonomi.

Selama lebih dari tiga puluh dua tahun berkuasa, menurut catatan sejarah rezim otoriter di bawah pimpinan Soeharto telah memusuhi umat Islam selama 22 tahun dan hanya 10 tahun dimasa akhir jabatannya ia berubah menjadi kawan dengan umat Islam

Bergesernya sikap politik Soeharto terhadap umat Islam, dari tidakannya yang represif berbalik kearah yang akomodatif, memunculkan berbagai pendapat mengenai latar belakang dari pergeseran sikapnya tersebut. Berbagai pendapat tersebut dapat penulis golongkan menjadi tiga bagian, yakni pertama, sebagai bentuk kooptasi Soeharto terhadap umat Islam; kedua, adanya akomodasi Soeharto terhadap umat Islam; dan yang ketiga, adalah salah satu bentuk integrasi umat Islam terhadap Soeharto.

Pertama, kooptasi Soeharto terhadap umat Islam. Soeharto sebagai pemegang kekuasaan merupakan subjek yang menjadikan umat Islam sebagai obyek yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan politiknya. Dengan melihat keadaan ABRI yang berkurang kelojalannya terhadap Soeharto, maka Soeharto mendekati

umat Islam yang memiliki suara mayoritas sebagai kekuatan politiknya, guna menyukseskan pemilu 1992. Selain itu dapat juga dilihat dari pembentukan dan pertumbuhan ICMI yang selalu mendapatkan kontrol ketat dari Soeharto.

Kedua, adanya akomodasi Soeharto terhadap umat Islam. Soeharto telah menyadari, bahwa selama ini telah berbuat tidak adil terhadap umat Islam. Maka di akhir masa jabatannya ia ingin memperbaiki sikapnya dengan lebih memperhatikan umat Islam melalui beberapa kebijakannya. Hal tersebut dapat dilihat pula dalam keislamannya yang bertambah kuat dan menunaikan ibadah haji pada tahun 1991.

Ketiga, merupakan bentuk integrasi umat Islam terhadap Soeharto. Dengan adanya penghijauan dalam tubuh ABRI, maka memudahkan umat Islam untuk melebarkan sayapnya dalam dunia perpolitikan. Pergantian posisi-posisi penting pada orang-orang di sekitar Soeharto, memberikan pengaruh yang besar terhadap pergeseran sikap politik Soeharto. Hal ini dapat di lihat pada sosok yang dekat dengan Soeharto, seperti Habibie yang mana ia merupakan seorang muslim yang saleh yang rajin mengerjakan shalat dan puas senin kamis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran pendapat sebagai sumbangan pemikiran yang kiranya dapat memberi motivasi bagi setiap orang. Diantaranya:

Sejarah masa lalu yang sangat penting dan kiranya perlu untuk dimunculkan kepermukaan sebagai pelajaran di masa yang akan datang, agar kita lebih arif dalam mengambil segala tindakan atau keputusan.

Dalam rangka mengembangkan wawasan keilmuan atau pengetahuan, para pembaca hendaknya membaca juga buku-buku sumber yang dijadikan bahan rujukan dalam skripsi ini.

Filename: BAB V
Directory: E:\Chanif Nitip\skripsiku
Template: C:\Documents and Settings\M Hanif\Application
Data\Microsoft\Templates\Normal.dot
Title: Kesimpulan
Subject:
Author: Mei
Keywords:
Comments:
Creation Date: ٠٢:٥٦:٠٠ ٢٠٠٨/٠٦/١١ م
Change Number: 23
Last Saved On: ١٠:٥٦:٠٠ ٢٠٠٨/٠٨/٠٧ م
Last Saved By: Mei
Total Editing Time: 192 Minutes
Last Printed On: ٠٩:٢٢:٠٠ ٢٠٠٨/٠٨/٠٩ ص
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 3
Number of Words: 442 (approx.)
Number of Characters: 2,520 (approx.)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, *Politik Islam Politik, Pergulatan Ideologi PPP Menjadi Partai Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Grafindo Perada, 1998.
- Adian Husaini, *Soeharto 1998*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Agus Butar Butar, "Aku Bukan Satu-satunya yang Islam di ABRI", dalam *Forum Keadilan*, No. 23, Tahun III, 2 Maret 1995.
- Alfian, *Masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia: Kumpulan Karangan*. Jakarta: Gramedia, 1986.
- Bahtiatiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam Di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: A-Ruzz Media, 2007.
- Dwipayana dan Ramadhan. *Ottobiografi; Soeharto Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya*. Jakarta: PT Citra Lamtoro Gung Persada, 1989.
- Dye, *What governments Do, Why They do it, What Difference it Makes*. Tuscaloosa: university of Albana Press, 1976.
- Easton, David. "Analisis Sistem Politik", dalam: Mohtar Mas'oed dan Colin Mc Andrews (ed.), *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000.
- Eep Saefullah Fatah, *Penghianatan Demokrasi Ala Orde Baru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Elson, *Soeharto, Sebuah Biografi Politik*, terj. Sastro Wahono dan Harimorti Bagoesoka. Jakarta: Pustaka Minda Utama, 2005.
- Faisal Ismail, *Ideology Hegemoni dan Otoritas Agama*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.

- Gottscalk, Louis. *Mengerti Sejarah, Terj.* Nugroho Noto Santos. Jakarta: UI Press, 1995.
- Hadari Nawawi dan Mimi Martin. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia Ditinjau dari Sudut Hukum*. Yogyakarta: UGM Press, 1994.
- Haedar Nashir, “Setelah Jilbab diperbolehkan”, *Panji Masyarakat*. No.676. 14-24 Sya'ban 1411, 1-11Maret 1991.
- Hamka, “Hati ke Hati”, *Majalah Panji Masyarakat*, 11 Januari 1986
- Hartono Mardjono, *Politik Indonesia 1996-2003*. Jakarta: Gema Insani Press, 1966.
- Harun Asroah, *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Indonesia, 1999.
- Harun Nasution, *Islam, ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 1985.
- Inka, “Riwayat Sk Pamungkas”, *Suara Muhammadiyah*, No.06/76/1991, 16-31 Maret 1991.
- Julizar Kasiri dan Wahyu Muryadi. “1000 Da’i untuk Transmigran”, *Tempo*, 10 November 1990.
- Kafrawi, *Pembaharuan Sistem Pendidikan Pondok Pesantren*. Jakarta: PT. Cemara Indah, 1978.
- Ki Juru Bangunjiwo, *Misteri Pusaka-Pusaka Soeharto*, Yogyakarta: Galang Press, 2007.
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang, 1995.
- Lili Romli, *Islam Yes Partai Islam Yes*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Linda Djalil dan Heri Mohammad, “Jenderal Tempat Kiai Mengadu”, *Gatra*, 18 Februari 1995.
- Machnun Husein, *Pendidika Islam dan Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Nurcahaya, 1983.
- Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu 1999.
- Miriam Budiarto dan Tri Nuke Pudjiastuti, *Teori-Teori Politik Dewasa Ini* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Mohammad Kamal Hassan, *Modernisasi Indonesia, Respon Cendekiawan Muslim*. Jakarta: LSI, 1987.

Muarif, "Soeharto dan Islam Di Indonesia Tahun 1985-1988: Kebijakan Akomodatif Dan Respon Islam". Skripsi, Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

Muhammad Duad Ali, *Kedudukan Hukum Peradilan Agama dalam UUD 1945*, Jakarta: DDII Pusat, 1989.

Nazaruddin Dwipayana, *Jejak Langkah Pak Harto*. Jakarta: Citra Lamtoro Gung, 1991.

Parsons, Wayne. *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*,. Terj. Tri Wibowo Budi Santoso Jakarta: Kencana, 2006.

Ratna Lukita, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. Jakarta: INIS XXXN, 1998.

Rifai Hutapea, "Ketika Soeharto Ijo Royo-royo", dalam *Majalah Islam Sabili*, Juli 2004 edisi khusus Islam Lawan atau Kawan.

Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, terj. Satrio Wahono dkk. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005.

Roeder, *Anak Desa, Biografi Presiden Soeharto*. Jakarta: Gunung Agung, 1969.

Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islampolitik*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.

_____, *Dinamika Islam di Indonesia Suatu Tinjauan Sosiasl dan Politik*. Yogyakarta: Hanindita, 1985.

Sjadzali, *Peranan Umat Islam dalam Pembangunan*. Jakarta: UI Press.

Sudirman Tebba, *Islam Orde Baru, Perubahan Politik dan Keagamaan*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993.

Sudrajat Taruno, "Subject: SJT - Benny Moerdani", <http://www.library.oihou.edo/indopules 199/07/000.html>

Syafii Anwar, "Islam, Negara dan Formasi Sosial dalam Dimensi Sosio-Historis Kelahiran dan Perkembangan ICMI," dalam Jurnal Ulumul Qur'an, Vo. III, No.3, Tahun 1992.

_____, "Soeharto dan Islam",
<http://kabinetindonesia.wordpress.com/2008/02/16/Soeharto-dan-Islam/>

Syukron Ma'mun Hidayat, *Islam dan Militer: Dinamika Hubungan Gerakan Islam Politik dan Militer di Indonesia*. Skripsi, Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Taufiq Nugroho, *Islam dan Negara Pancasila*. Yogyakarta: Padma, 2003.

Wahyu Muryadi, "Ide-ide Setelah Membaca Kiblat", *Tempo*, 8 Desember 1990.

_____, "Islam Milik Semua", dalam *Tempo*, 6 Juli 1991.

Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1994.

Filename: Daftar pustaka
Directory: E:\Chanif Nitip\skripsiku\Intaha
Template: C:\Documents and Settings\M Hanif\Application
Data\Microsoft\Templates\Normal.dot
Title: Daftar pustaka
Subject:
Author: Mei
Keywords:
Comments:
Creation Date: م 02:58:00 2008/06/11
Change Number: 30
Last Saved On: م 02:36:00 2008/08/07
Last Saved By: Mei
Total Editing Time: 231 Minutes
Last Printed On: ص 09:55:00 2008/08/10
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 4
Number of Words: 798 (approx.)
Number of Characters: 4,551 (approx.)

Lampiran 1

DAFTAR SINGKATAN

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
BMI	: Bank Muamalat Indonesia
BKM	: Badan Koordinasi Muslimin
BPR S	: Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah
CADUAT	: Cadangan Umum Angkatan Darat
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FABRI	: Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
FKP	: Fraksi Karya Pembangunan
FUD	: Fraksi Utusan Daerah
Golkar	: Golongan Karya
GUPPI	: Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam
G-30-S	: Gerakan 30 September
HMI	: Himpunan Mahasiswa Islam
ICMI	: Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
KNIL	: Koninklijk Nederlands Indishche Leger
KOSTRAD	: Komando Strategi Angkatan Darat
Masyumi	: Majelis Syuro Muslimin Indonesia
MDI	: Majelis Dakwah Islam
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NU	: Nahdatul Ulama
Orba	: Orde Baru
Ormas	: Organisasi Masyarakat
PA	: Peradilan Agama
Pangad	: Panglima Angkatan Darat
Pangkopkamtib	: Panglima Korps Keamanan dan Ketertiban

Parmusi	: Partai Muslim Indonesia
Parpol	: Partai Politik
PDII	: Partai Demokrasi Islam Indonesia
Pemilu	: Pemilihan Umum
Permesta	: Pergerakan Semesta
PETA	: Pembela Tanah Air
PII	: Pelajar Islam Indonesia
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PRRI	: Pergerakan Rakyat Republik Indonesia
PT	: Perguruan Tinggi
Rapim	: Rapat Pimpinan
RI	: Republik Indonesia
RUU	: Rancangan Undang-undang
SESKOAD	: Staf dan Komando Angkatan Darat
SKB	: Surat Keputusan Bersama
SLTA	: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SLTP	: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
TK	: Taman Kanak-kanak
UU	: Undang-Undang
YAMP	: Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila

Lampiran 2

SUSUNAN KABINET PEMBANGUNAN VI¹

NAMA	JABATAN
Yogi Suardi Memed	Menteri Dalam Negeri
Ali Alatas, SH.	Menteri Luar Negeri
Jend. TNI Edi Sudrajat	Menteri Pertahanan dan Keamanan
Oetojo Oesman	Menteri Kehakiman
Harmoko	Menteri Penerangan
Drs. Mar'I Mohammad	Menteri Keuangan
Prof. Dr. Satrio Budiardjo Joedono	Menteri Perdagangan
Ir. Tunky Ariwibowo	Menteri Perindustrian
Dr. Ir. Sjarifuddin Baharsyah	Menteri Pertanian
I. B. Soedjana	Menteri Pertambangan dan Energi
Ir. Jamaliddin Soerjohadikoesoemo	Menteri Kehutanan
Ir. Radinal Mochtar	Menteri Pekerjaan Umum
Harjanto Danutirto	Menteri Perhubungan
Joop Ave	Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi
Drs. Subiakto Tjakrawerdya	Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil
Drs. Abdul Latief	Menteri Tenaga Kerja
Ir. Siswono Yudhohusodo	Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan
Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Prof. Dr. Sujudi	Menteri Kesehatan
Dr. Tarmizi Taher	Menteri Agama
Ny. Dra. Ending Kusuma Inten Soeweno	Menteri Sosial
Drs. Moerdiono	Menteri Sekretaris Negara
Drs. Saadilah Mursyid, Mpa	Menteri Negara Sekretaris Kabinet
Ir. Drs. Ginanjar Kartasasmita	Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bapenas
Prof. Dr. Ing. B. J. Habibie	Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT/ Ketua BPIS
Prof. Dr. Ibrahim Hasan	Menteri Negara Urusan Pangan/Bulog
Dr. H. Haryono Suyono	Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN
Ir. Sanyoto Sastrowardoyo	Menteri Negara Penggerak Dana

¹ Nama-nama ini diambil sesuai dengan jabatan dan kepangkatan pada daftar sarasehan doktrin dan perjuangan TNI-ABRI "Catur Dharma Eka Karya" (CADEK), di Mabes TNI-ABRI Cilangkap, Jakarta, pada 20 Februari 1988, yang dikutip dari buku *Doktrin Perjuangan TNI-ABRI "Catur Dharma Eka Karya"* (CADEK) (Jakarta: Mabes ABRI, 1988), hlm. 106-111, dalam Skripsi Syukron Ma'mun Hidayat, halaman lampiran xii.

	Investasi/Ketua BPKM
Ir. Soni Harsono	Menteri Negara Agrarian/Kepala BPN
Sarwono Kusuma Atmaja	Menteri Negara Lingkungan Hidup
Ny. Men Sughandi	Menteri Negara Urusan Wanita
Haryono Isman	Menteri Negara Pemuda dan Olahraga
T. B. Silalahi	Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara
Prof. Dr. Salih Affif	Menteri Negara Koordinasi Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan
Ir. Hartato	Menteri Negara Koordinasi Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pengawasan Pembangunan
Ir. Azwar Anas	Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Dr. J. Soedrajat Djuwandono	Gubernur Bank Indonesia
Jend. TNI. Edi Sudrajad	Panglima ABRI
Singgih, SH.	Jaksa Agung

CURICULUM VITAE

Nama : Siti Maesaroh
Tempat/tanggal lahir : Cilacap, 20 Januari 1986
Nama Ayah : Mikun
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Tusinah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Kedungreja, Rt 03/Rw 04 No.59
Cilacap-Jawatengah

Pendidikan

SD : SDN Jatisari 04, tahun lulus 1998
SLTP : MTs ELL-Firdaus 2 Kedungreja, tahun lulus 2004
SLTA : MAN Majenang, tahun lulus 2004
UIN sunan kalijaga yogyakarta, than masuk 2004

Filename: Lamp akhir
Directory: E:\Chanif Nitip\skripsiku\Intaha
Template: C:\Documents and Settings\M Hanif\Application
Data\Microsoft\Templates\Normal.dot
Title: SUSUNAN KABINET PEMBANGUNAN VI
Subject:
Author: Mei
Keywords:
Comments:
Creation Date: 07:06:00 2008/07/19
Change Number: 25
Last Saved On: 11:58:00 2008/08/07
Last Saved By: Mei
Total Editing Time: 127 Minutes
Last Printed On: 09:39:00 2008/08/10
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 5
Number of Words: 812 (approx.)
Number of Characters: 3,639 (approx.)